



BAB I

PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1.1. Latar Belakang Masalah

Perluasan sektor publik Indonesia meningkatkan kebutuhan akan akuntabilitas publik dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan oleh munculnya delegasi tanggung jawab, pembagian kekuasaan, dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, (Rahayu et al., 2024). Muti'ah et al. (2025), menyatakan perluasan sistem pemerintahan berbasis otonomi daerah, menjadikan pengelolaan keuangan daerah sebagai aspek yang sangat penting, dimana penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan akuntabel kepada pemerintah daerah, yang diwujudkan melalui pengaturan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan, hal ini menuntut adanya sistem akuntansi sektor publik yang akuntabel, tanggung jawab ini secara spesifik terkait erat dengan pengelolaan keuangan daerah, yang kini menjadi tuntutan umum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat, menjadikan asas otonomi daerah ini pendorong bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah (Fauzziyah et al., 2025).



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Asmawanti et al., 2022).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola dana publik yang diperoleh melalui pendapatan daerah serta dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah maka akan semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Fauzziyah et al., 2025).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan seseorang dan menerima hasilnya, kewajiban membela dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pihak yang berwenang merupakan salah satu komponen akuntabilitas. Akuntabilitas lebih dari sekedar pelaporan, hal ini juga mencakup sikap terbuka dan jujur dalam semua tindakan individu atau organisasi, hal ini menyoroti betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Sebagai alat pemantauan, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pilihan dan tindakan sejalan dengan norma dan harapan yang ditetapkan oleh mereka yang menduduki posisi tanggung jawab, maka kepercayaan antar pihak yang bertanggungjawab dengan pihak berkepentingan merupakan landasan utama akuntabilitas (Efrina et al., 2024).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggung jawaban yang dilakukan didalam suatu instansi dimana pihak yang berkepentingan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan, sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Silooy, 2023).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor penyajian laporan keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan (Asmawanti et al., 2022).

Laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi unsur kualitasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga eksternal pemerintah, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa Laporan Keuangan



Pemerintah Daerah (LKPD). Opini yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menggambarkan tingkat akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Adanya perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari kenaikan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, opini audit yang dihasilkan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. (Silooy, 2023).

Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan puncak tertinggi dari akuntabilitas pengelolaan keuangan pada suatu daerah. Berhasil diakses dari Inhiltoday.com (2025) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut sejak 2016 hingga 2024, menjadi bukti keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mempertahankan predikat tertinggi dalam akuntabilitas keuangan.

Berhasil ditemukan masalah terkait dalam 3 tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kualitas penyajian laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal belum sepenuhnya kuat untuk mencegah masalah-masalah ini terjadi, dari situs yang berhasil diakses dari goriau.com (2023), adanya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2023 sebesar RP400 miliar menyebabkan banyak pengerjaan proyek yang merasa dirugikan karena ketiadaan kas daerah untuk membayar hasil pekerjaan mereka dan gaji guru ASN dan P3K belum terbayarkan oleh pemerintah daerah.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tahun berikutnya, LKPD 2024 dimana BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal kepada Kabupaten Indragiri Hilir, penekanan suatu hal berarti ada masalah signifikan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan, tetapi menandakan risiko dalam pengelolaan keuangan sehingga mencerminkan kelemahan pada karakteristik penyajian laporan keuangan serta sistem pengendalian internal, berdasarkan informasi yang berhasil diakses dari situs BPK RI (2025), BPK Riau menjelaskan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain penyusunan anggaran, pengendalian belanja, dan manajemen kas yang belum optimal, belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja perangkat daerah yang mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah daerah menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan dan menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa utang belanja yang membebani anggaran tahun berikutnya.

Upaya Kabupaten Indragiri Hilir mewujudkan kembali akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya pada tahun 2025, dari data yang berhasil diakses dari Pesisirnews (2025), menggelar rapat evaluasi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun anggaran 2025 hingga bulan Mei 2025, rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil evaluasi, realisasi fisik pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir hingga Mei 2025 tercatat sebesar 27,19%, sementara realisasi keuangan mencapai 25,04%, meminta seluruh OPD khususnya yang capaian realisasinya masih rendah, agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Fenomena ini mempertegas adanya kesenjangan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Secara teoritis, penyajian laporan keuangan yang berkualitas meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Begitu pula, sistem pengendalian internal dapat menjamin keandalan laporan keuangan dan menanamkan mekanisme untuk memastikan semua kegiatan pengelolaan keuangan mematuhi peraturan perundang-undangan yang. Namun, faktanya OPD di Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan perbaikan yang fokus pada penyajian keuangan dan membawa implikasi pentingnya sistem pengendalian internal yang lebih akuntabel untuk mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menegaskan perlunya penelitian untuk mengetahui sejauh mana penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal benar-benar memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyajian laporan keuangan merupakan aspek yang sangat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi penting mengenai kondisi keuangan entitas pelapor dan seluruh transaksinya dalam jangka waktu pencatatan tertentu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Penyajian informasi yang utuh di dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Asmawanti et al., 2022).

Sejalan dengan Silooy (2023), penyajian laporan keuangan oleh pemerintah merupakan faktor krusial dalam menghasilkan atau menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan dan diwajibkan untuk berupaya secara maksimal dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dikarenakan laporan keuangan pemerintah adalah wahana atau media untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Saat pemerintah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan jujur dengan memuat semua informasi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan dievaluasi semakin baik.

Kebutuhan akan suatu sistem yang dapat mendukung terciptanya akuntabilitas diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan kepala daerah. Regulasi ini menjadi dasar penting dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.



Sistem dan prosedur tersebut merujuk pada sistem pengendalian internal, dalam kerangka regulasi, pemerintah menetapkan adanya sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang harus dilaksanakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sistem pengendalian internal tersebut sebagai suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan yang cukup terhadap pelaksanaan tujuan organisasi, melalui operasi yang efisien dan efektif, keandalan keuangan, pelaporan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan dengan hukum. Sistem pengendalian internal berguna untuk memantau jalannya kegiatan pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Amalia, 2022).

Sebagaimana diungkapkan oleh Silooy (2023), sistem pengendalian *intern* yang diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan akan mampu memberikan jaminan bahwa seluruh rangkaian proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan diawali dari perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan demikian efektif tidaknya penerapan sistem pengendalian *intern* akan sangat berpengaruh terhadap baiknya akuntabilitas keuangan pemerintah.

Sesuai dengan Rahayu et al. (2024), jika sistem ini berfungsi dengan baik diseluruh lembaga, dimulai dengan sistem yang kuat, hal ini dapat menghentikan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan sumber daya. Oleh karena



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

itu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan dipertanggungjawabkan dengan standar tanggung jawab yang lebih tinggi sehingga kesalahan dapat dihindari dan diatasi, serta memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian Silooy (2023), yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan penelitian Muttaqien et al. (2024), yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbeda dengan penelitian Yunus et al. (2025), berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian dari Defana & Rahayu (2023), yang berjudul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, hasil penelitian ini tidak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di kabupaten Indragiri Hilir dan ketidak konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan review dari peneliti sebelumnya yaitu penelitian Silooy (2023) yang berjudul " Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian *Intern* terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon)". Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon sebagai lokasi penelitian, pada tahun 2023 sementara dalam penelitian ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mencermati seberapa jauh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan sistem pengendalian internal yang kuat mewujudkan akutanbilitas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir).**



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?.
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris Penyajian Laporan Keuangan dan Pengaruh Pengendalian Internal secara Simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawabannya ialah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan pada instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Asmawanti et al., 2022).

b. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan dilakukan oleh entitas pelapor sebagai sarana untuk memberikan kemudahan dalam menciptakan akuntabilitas publik adalah dengan menyampaikan laporan keuangan secara komperehensif, maka pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola sumber daya keuangan yang ada harus bisa memberikan pertanggungjawaban publik melalui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap, jujur dan tepat waktu (Silooy, 2023).

c. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan



keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Defana dan Rahayu, 2023).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan untuk mengetahui lebih tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dan bermanfaat untuk memahami teori sebagai tambahan informasi dalam penelitian mahasiswa dan mahasiswi selanjutnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangan pikiran terutama mengenai penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Indragiri Hilir.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.